



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp. (0362) 21142
S I N G A R A J A

Singaraja, 11 Januari 2023

Nomor : 000.7.3/120/I/BAPPEDA/2023
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : **Penyampaian**
Data Informasi
LKPJ Tahun 2022

Kepada :
Yth. Pimpinan SKPD
Lingkup Pemerintah
Kabupaten Buleleng
(Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Sesuai Amanat Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada BAB III Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), maka diharapkan Saudara/i dapat menyampaikan Data Informasi sebagai berikut :

1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing pada setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai dengan target dalam Dokumen Anggaran dan permasalahan yang dihadapi serta upaya mengatasi permasalahan yang telah dilakukan Perangkat Daerah (Kondisi Akhir Tahun 2022);
2. Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Buleleng terhadap LKPJ Bupati Buleleng Tahun 2021;
3. Struktur APBD dan Rincian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 (BPKPD);
4. Penyajian Data Informasi pada point 1 dan 2, agar mengacu pada format (*terlampir*)

Mengingat pentingnya data dimaksud, diharapkan agar dapat disampaikan ke **Bappeda Kabupaten Buleleng Cq. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah paling lambat tanggal 27 Januari 2023** (*hard copy dan soft copy*).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN I

Surat Nomor : 000.7.3/120/I/BAPPEDA/2023

Tanggal : 11 Januari 2023

DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
6. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
7. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
8. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Buleleng
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
12. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
13. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
14. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
17. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
20. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
21. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng
22. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
24. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
25. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
26. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
27. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng
28. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
29. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
30. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
31. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng
32. Camat Buleleng
33. Camat Sukasada
34. Camat Sawan
35. Camat Kubutambahan
36. Camat Tejakula
37. Camat Banjar
38. Camat Seririt
39. Camat Busungbiu
40. Camat Gerokgak

Lampiran II

Surat Nomor : 000.7.3/120/I/BAPPEDA/2023

CONTOH FORMAT PENYAJIAN

1.01 (CONTOH) URUSAN PENDIDIKAN

Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaannya menyebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, untuk itu setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menjadikan Warga Negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*), sehingga mendorong pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan pendidikan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya Dan Berintegritas Sedangkan Sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2022 dan dalam rangka mewujudkan Tujuan dimaksud diatas adalah Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan dengan Indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah PAUD HI yang memenuhi Kriteria;
- b. Meningkatnya Angka Melek Huruf;
- c.dst (*uraian dasar hukum pelaksanaan Urusan, dan penjabaran arah kebijakan tujuan maupun sasaran sesuai Renstra maupun Renja Perangkat Daerah*)

**Penjabaran Program, Kegiatan
Sub Kegiatan dan Anggaran SKPD Tahun 2022**

No	Jumlah Program Kegiatan Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)
	(1)	(2)		(3)
1	Induk	Program	<i>*) diisi total jumlah program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai DPA</i>	<i>*) diisi dengan nilai Anggaran sesuai DPA pelaksanaan</i>
		Kegiatan		
		Sub Kegiatan		
2	Perubahan	Program		Rp.
		Kegiatan		
		Sub Kegiatan		

A. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, alokasi anggaran sebesar Rp....., realisasi sebesar Rp.....atau%. Dengan capaian keluaran (output) mencapai % yang dijabarkan melalui*(diisi jumlah total Program)* Program.... *(diisi jumlah total Kegiatan)* Kegiatan dan..... *(diisi jumlah total Sub Kegiatan)* Sub Kegiatan, sebagai berikut :

a) Program Penunjang (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)

Program Penunjang pada **Urusan/SKPD**..... terdiri dari Program,..... Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp....., realisasi anggaran sebesar Rp..... atau ... %. Dengan Capaian % , yang dijabarkan sebagai berikut : *(catatan : diisi dengan total jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, serta alokasi anggaran, realisasi dan capaian akumulatif pada program penunjang).*

1) Program....., dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.....realisasi keuangan sebesar Rp.....atau ..%, dengan capaian%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan.....,dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.....realisasi keuangan sebesar Rp.....atau ..%, dengan capaian%

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan.....*(uraikan nama sub kegiatan dan indikator sub kegiatan)* alokasi anggaran sebesar Rp....., realisasi Rp..... atau%. Dengan target *(diisi dengan jumlah target dan satuan)*, dengan realisasi (output) *(diisi dengan jumlah realisasi dan satuan)* atau....%.

b)

c)(*dst*)

**2.1 Kegiatan.....,dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.....realisasi keuangan sebesar Rp.....atau ..%, dengan capaian% *Penjabaran Kegiatan...Sub Keg...dan seterusnya, (sesuai contoh point 1. a).
.....dan seterusnya.....***

b) Program Utama (Program Prioritas/Unggulan yang dilaksanakan SKPD)

Sedangkan pada Program Utama pada Urusan Pendidikan terdiri terdiri dari Program,..... Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp....., realisasi anggaran sebesar Rp..... atau ... %. Dengan Capaian ... % , yang dijabarkan sebagai berikut : (*catatan : diisi dengan total jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, serta alokasi anggaran, realisasi dan capaian akumulatif pada program penunjang*).

1) Program....., dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.....realisasi keuangan sebesar Rp.....atau ..%, dengan capaian%.

Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan.....,dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.....realisasi keuangan sebesar Rp.....atau ..%, dengan capaian%

Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan.....(*uraikan nama sub kegiatan dan indikator sub kegiatan*) alokasi anggaran sebesar Rp....., realisasi Rp..... atau%. Dengan target (*diisi dengan jumlah target dan satuan*), dengan realisasi (*output*) (*diisi dengan jumlah realisasi dan satuan*) atau....%.

b)

c)(*dst*)

2.1 Kegiatan.....,dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.....realisasi keuangan sebesar Rp.....atau ..%, dengan capaian% *Penjabaran Kegiatan...Sub Keg...dan seterusnya, (sesuai contoh point 1. a).*

.....dan seterusnya.....

Lampiran II

Surat Nomor : 000.7.3/120/I/BAPPEDA/2023

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Urusan..... dapat dilihat pada Tabel..... berikut :

Tabel.....
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan.....
(dilaksanakan oleh Dinas.....)

NO	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR (OUTPUT/OUTCOME)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET (OUTCOME/OUTPUT)	REALISASI (OUTCOME/OUTPUT)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
1	Urusan	Dinas/Badan	*) Uraikan Arah kebijakan sesuai Renstra PD atau Renja PD	A PROGRAM PENUNJANG							*) Uraikan Permasalahan pada Urusan (apabila ada)	*) Uraikan Upaya pemecahan masalah	*) Uraikan hasil tindaklanjut DPRD (apabila mendapat rekomendasi)						
				1	Program.....	...(indicator outcome program)	5.000.000	5.000.000 (100%)	100%	99,14%									
					Kegiatan.....	...(indikator outcome)	Rp.	100%	100%	99,14%									
					Sub Kegiatan.....(indikator output)	2.000	1.500 (75,00%)	1 dokumen	1 dokumen (100%)									
							7 paket	6 paket (85,71%)									
				2	Program.....													
					Kegiatan.....													
					Sub Kegiatan.....													
					Dst.....														
				B PROGRAM UTAMA															
				1	Program.....	...(indicator outcome program)	5.000.000	5.000.000 (100%)	100%	99,14%									
					Kegiatan.....	...(indikator outcome)	Rp.	100%	100%	99,14%									
					Sub Kegiatan.....(indikator output)	2.000	1.500 (75,00%)	1 dokumen	1 dokumen (100%)									
							7 paket	6 paket (85,71%)									
				2	Program.....													
					Kegiatan.....													
					Sub Kegiatan.....													
	Dst.....																		
C JUMLAH TOTAL PROGRAM/KEGIATAN																			
					TOTAL JUMLAH PROGRAM A + B	TOTAL JUMLAH PROGRAM A + B	TOTAL JUMLAH PROGRAM A + B	TOTAL JUMLAH PROGRAM A + B	TOTAL JUMLAH PROGRAM A + B	TOTAL JUMLAH PROGRAM A + B									

B. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan terdapat beberapa kendala antara lain:

1.
2. *(permasalahan yang diuraikan bersifat permasalahan pada pelaksanaan Urusan)*

C. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya-upaya yang dilaksanakan:

1.
2.
3.*(dst)*

D. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yg sudah ditetapkan dalam PK

.....*(uraian singkat analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yg sudah ditetapkan dalam PK)*

E. Kebijakan Strategis Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)

**) Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis*

F. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

(diisi apabila mendapat catatan Rekomendasi DPRD, pada pelaksanaan periode sebelumnya)

Hasil Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)

Lampiran III

Surat Nomor : 000.7.3/120/I/BAPPEDA/2023

Catatan dan Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun 2021

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN (n-1) 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	CAPAIAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	a. Perekonomian Kabupaten Buleleng selama tahun 2021 masih belum mengembirakan karena tumbuh negatif (terkontraksi) sedalam -1,22%. Tetapi jika dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi hingga -5,76%, maka kondisi perekonomian tahun 2021 sudah semakin baik. Kondisi perekonomian pada tahun 2021 juga tampak lebih baik dibanding provinsi Bali yang masih negatif hingga -2,47%.			BAPPEDA
	b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari Rp.33,306 triliun lebih pada tahun 2020 menjadi Rp.33,337 Triliun lebih pada tahun 2021. Namun, PDRB berdasarkan harga konstan turun dari Rp.22,066 Triliun lebih pada tahun 2020 menjadi Rp.21,797 Triliun lebih pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan daerah mengalami inflasi yang cukup signifikan pada tahun 2021 mencapai sebesar 1,76%.			BAPPEDA
	c. PDRB per Kapita tahun 2021 menunjukkan penurunan dibanding			BAPPEDA

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN (n-1) 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
	<p>tahun 2020 baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku turun dari Rp.50,24 Juta lebih pada tahun 2020 menjadi Rp 41,33 Juta lebih pada tahun 2021. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan turun dari Rp.33.25 Juta lebih pada tahun 2020 menjadi Rp.27,02 Juta lebih pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat tahun 2021 semakin melemah.</p>			
	<p>d. Sektor usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap mendominasi PDRB Kabupaten Buleleng tahun 2021, dengan kontribusi sekitar 22,57%. Naik sekitar 0,27% dibanding tahun 2020 yang mencapai 22,25%. Sedangkan kontribusi sektor usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menurun dari 14,82% pada tahun 2020 menjadi 13,20% pada tahun 2021.</p>			BAPPEDA
	<p>e. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng tahun 2021 mencapai 72,56, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 72,55. Tetapi masih lebih rendah dari IPM provinsi Bali sebesar 75,69 pada tahun 2021.</p>			BAPPEDA
	<p>f. Jumlah penduduk miskin tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020 dari 35.250 jiwa atau 5,32% menjadi 40.920 jiwa atau 6,12%.</p>			BAPPEDA
2.	PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH			

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN (n-1) 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
	<p>a. Realisasi Pendapatan Daerah</p> <p>Anggaran pendapatan daerah tahun 2021 setelah 3 (tiga) kali mengalami perubahan APBD dirancang sebesar Rp.2,158 Triliun lebih, terealisasi sebesar Rp.2,083 Triliun lebih atau 96,50% (sudah optimal).</p> <p>Capaian realisasi PAD Rp.391,988 Miliar lebih atau 99,18% dari target Rp 395,236 Miliar lebih. Capaian PAD dari retribusi daerah masih kurang optimal karena baru mencapai Rp.36,150 Miliar lebih atau 79,49% dari target Rp.45,478 Miliar lebih.</p> <p>Pendapatan transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer antar daerah hanya Rp.189,978 Miliar lebih atau 85,51% dari target Rp.222,153 Miliar lebih.</p>			BPKPD
	<p>b. Realisasi Belanja Daerah</p> <p>Realisasi Belanja Daerah tahun 2021 sudah tergolong optimal karena mencapai 93,33% atau Rp.2,070 Triliun lebih dari anggaran sebesar Rp.2,218 Triliun lebih.</p> <p>Komposisi belanja daerah tahun 2021 sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Operasi Rp.1,625 Triliun lebih (78,52% dari total belanja daerah) 2) Belanja Modal Rp.202,523 Miliar lebih (9,78% dari total belanja daerah) 3) Belanja tidak terduga Rp.5,190 Miliar lebih (0,25% dari total belanja daerah) 			BPKPD

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN (n-1) 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
	4) Belanja Transfer Rp.236,969 Miliar lebih (11,45% dari total belanja daerah)			
3.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan pembangunan daerah pada tahun 2022 dan seterusnya, DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut:				
1)	Optimalisasi capaian makro ekonomi			
a.	Kondisi ekonomi tahun 2021 sudah mengarah lebih baik meskipun masih berkontraksi dengan laju pertumbuhan ekonomi. -1,22%, bertumbuh positif dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mencapai -5,76%. Sehubungan dengan hal itu diharapkan Pemerintah Daerah melakukan dan merumuskan kembali keunggulan komparatif wilayah dan dijabarkan melalui program dan kegiatan prioritas dimasa mendatang.			BAPPEDA & BPKPD
b.	Sektor usaha pertanian secara konsisten memberikan kontribusi positif dan sangat besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng, termasuk dalam kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu, pembangunan sektor usaha ini perlu lebih mendapat prioritas, disertai alokasi anggaran yang proporsional (memadai) mulai tahun anggaran 2023 dan seterusnya untuk pengembangan infrastruktur, penyediaan peralatan produksi, penanganan pasca panen, dan fasilitasi pemasaran.			BAPPEDA & BPKPD
c.	Proporsi penduduk miskin 6,12%			BAPPEDA &

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN (n-1) 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
	meningkat 0,80% dibandingkan tahun 2020 sebesar 5,32% dan lebih tinggi dan Provinsi Bali sebesar 4,53%. Sehubungan dengan itu, kebijakan penanganan penduduk miskin agar dilakukan dengan program-program yang terukur dan implementatif, menyentuh akar permasalahan penyebab kemiskinan.			BPKPD
2)	Optimalisasi capaian PAD			
a.	Retribusi Daerah pada tahun 2021 tercapai Rp.36,150 Miliar lebih atau 79,49% dari target Rp.45,478 Miliar lebih. Untuk itu, mulai tahun 2023 retribusi lebih ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek retribusi.			BPKPD
b.	Kontribusi BUMD dalam peningkatan PAD dioptimalkan.			BPKPD
c.	Optimalisasi digitalisasi ekonomi, khususnya pemasaran produk-produk daerah dan jasa pelayanan Pemerintah Daerah.			BPKPD, DISKOMINFO & DISPERINDAGKOP -UKM
d.	Pemerintah Daerah hendaknya memanfaatkan jasa bank milik daerah secara proporsional sesuai kapasitasnya dan pihak bank menyiapkan SDM yang memadai sesuai tuntutan perbankan.			BPKPD
3)	Penyusunan Ranperda dan Optimalisasi implementasi Peraturan Daerah			
a.	Implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ditetapkan, agar betul-betul bisa dilaksanakan.			BAGIAN HUKUM
b.	Evaluasi Produk hukum daerah (Perda) perlu dioptimalkan agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.			BAGIAN HUKUM

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN (n-1) 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
c.	Perda-perda yang telah diundangkan agar segera disosialisasikan dan dilaksanakan.			BAGIAN HUKUM
d.	Perda Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan agar menjadi salah satu dasar hukum dalam penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).			BAGIAN HUKUM & DINAS PERTANIAN
e.	Percepatan penyusunan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033.			BAGIAN HUKUM & DINAS PUTR
f.	Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat dituntaskan dan segera dapat diajukan ke DPRD untuk mendapat pembahasan.			BAGIAN HUKUM & DISPERKIMTA
g.	Dibidang penanaman modal perlu segera disiapkan Perda tentang pemberian fasilitas/insentif dalam upaya peningkatan jumlah investor ke daerah.			DPMPSTP
4)	Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD			
a.	Belanja Modal terealisasi Rp.202,523 Miliar lebih atau 85,94% dari target Rp.235,655 Miliar lebih. Terlepas dari adanya efisiensi, maka kedepan perencanaan anggaran belanja hendaknya direncanakan lebih rigid sehingga sisa anggaran tidak terlalu besar, yang semestinya bisa digunakan untuk mendanai program program yang lebih mendesak. Demikian pula halnya			BPKPD

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN (n-1) 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
	terhadap belanja-belanja lainnya hendaknya didasari atas kebutuhan riil yang lebih rigid.			
b.	Pendistribusian anggaran pada dokumen PPAS hendaknya memperhatikan skala prioritas sesuai tema pembangunan yang ditetapkan.			BPKPD
c.	Untuk menghindari adanya kegiatan yang dilaksanakan dengan model " <i>Trial and Error</i> ", maka peran Litbang ditingkatkan, baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga lainnya.			BALITBANG
d.	Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan <i>good governance</i> , maka penerapan <i>e-government</i> lebih diintensifkan dan diperluas cakupannya.			SETDA & DISKOMINFO
e	Standar harga yang ditetapkan oleh Bupati agar memperhatikan realisasi harga tahun sebelumnya dan harga riil saat ini.			BPKPD
5)	Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan dan Program			
(1)	Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya mendapat prioritas melalui diklat kepemimpinan dan diklat teknis sehingga bisa melaksanakan tugas sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.			BKPSDM
(2)	Pengawasan internal berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan terus dioptimalkan karena capaian realisasi keuangan dan luaran/fisik (<i>output</i>) beberapa urusan, seperti urusan Pertanahan, urusan Kesehatan, urusan Pekerjaan Umum dan			INSPEKTORAT

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN (n-1) 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Tata Ruang, dan urusan Pariwisata belum optimal atau kurang dari 90%.			
(3)	Program UHC yang saat ini mengalami hambatan karena 74.000 lebih terblokir Pemerintah Daerah agar segera mendapat penanganan terutama bagi pemegang KIS masyarakat miskin			DINKES & DINSOS
(4)	Validasi data KIS, hendanya dilakukan dengan obyektif karena banyak kepesertaan doble, pekerjaan wiraswasta dapat KIS, peserta yang sudah meninggal, pindah domisili, dan masyarakat yang sudah mampu ekonominya juga mendapat KIS. Hal ini mengakibatkan premi yang dibayarkan oleh Pemerintah daerah mubasir, sehingga program UHC agar ditinjau kembali.			DINKES & DINSOS
(5)	KIS yang terblokir menyebabkan hutang daerah kepada rumah sakit kurang lebih 50 Milyar dan mengakibatkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin menjadi terhambat, harus diselesaikan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat.			DINSOS
(6)	Penyebab terblokirnya KIS, harus disosialisasikan kepada masyarakat.			DINKES & DINSOS
(7)	Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin yang terblokir KIS nya, semestinya mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat yang terblokir KIS nya mengakibatkan bertambahnya piutang pada rumah sakit.			DINKES ,RSUD & DINSOS
(8)	Piutang rumah sakit terhadap pasien miskin yang belum terbayar hendaknya dicarikan solusi.			BPKPD & RSUD

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN (n-1) 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
(9)	Meningkatkan status rumah sakit pratama menjadi tipe C untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan KIS bisa dirujuk ke rumah sakit kita dan dapat menambah pendapatan pada rumah sakit yang bersangkutan.			DINKES ,RSUD & DINSOS
(10)	Memastikan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan secara cepat dan optimal.			DINKES & RSUD
(11)	Untuk menyiapkan SDM berkualitas, pencegahan dan penanganan stunting harus mendapat prioritas.			DINKES & DP2KBP3A
(12)	Validasi data pemilih penduduk Kabupaten Buleleng perlu segera dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.			DISDUKCAPIL
(13)	Evaluasi kompetensi tenaga kontrak untuk melengkapi pelaksanaan tugas ASN yang ada.			BKPSDM
(14)	<i>Mall pelayanan public</i> perlu segera direalisasikan. Sementara belum dapat direalisasi, maka OPD teknis terkait agar menempatkan personilnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.			DPMPTSP
(15)	Untuk meningkatkan kualitas koperasi perlu dilakukan adanya dukungan pendampingan pengelolaan lembaga koperasi secara nyata dan terhadap koperasi yang bermasalah perlu adanya tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			DISPERINDAGKOP -UKM
(16)	Sosialisasi dan pendampingan perizinan			DPMPTSP

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN (n-1) 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
	kepada para pengembang perumahan dioptimalkan.			
(17)	Bagi investasi yang akan dilaksanakan di Kawasan/kecamatan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang, maka pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Persetujuan KKPR) didasarkan pada rekomendasi Forum Tata Ruang.			DPMPTSP & DINAS PUTR
(18)	Penertiban pedagang di tepi jalan umum yang menjadi obyek pemungutan retribusi.			SATPOL-PP
(19)	Optimalisasi pelayanan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG), baik untuk keperluan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF).			DINAS PUTR
(20)	Optimalisasi pelaksanaan lelang pekerjaan konstruksi sehingga tidak terjadi lagi rekanan terpilih yang tidak bonafit dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan.			BAGIAN PBJ & PUTR
(21)	Jalan kabupaten dan jalan usaha tani yang kondisinya rusak, termasuk ruas jalan yang tidak dapat direalisasi dari sumber dana PEN agar segera mendapat penanganan.			DINAS PUTR & DINAS PERTANIAN
(22)	Jumlah Desa Mandiri pangan terus ditingkatkan setiap tahun.			DINAS PMD & DKPP
(23)	Merealisasikan penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan yang tertuang dalam Perda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mulai tahun			DKPP

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN (n-1) 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	
	anggaran 2023 dan seterusnya.			
(24)	Optimalisasi pengelolaan sampah untuk mencapai target Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah (Jakstrada).			DLH
(25)	Penambahan rambu-rambu lalu lintas, seperti <i>warning light</i> dan <i>traffick light</i> pada persimpangan jalan yang mengalami peningkatan tundaan lalu lintas secara signifikan.			DISHUB
(26)	Optimalisasi pendampingan dan pembinaan sitem pengelolaan air limbah Perikanan budidaya, khususnya <i>hatchery</i> dan tambak.			DLH & DKPP
(27)	Optimalisasi pengelolaan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sejalan dengan semakin melandainya intensitas serangan Covid-19 dan kebijakan Pemerintah untuk mempermudah kunjungan wisatawan ke Bali, terutama Destinasi Wisata yang terdapat di perbatasan wilayah kabupaten.			DINAS PARIWISATA
(28)	Optimalisasi fasilitas dan pedampingan kerjasama kemitraan antara UMKM dan pasar modern, serta eksportir.			DISPERINDAGKOP -UKM
(29)	Pengembangan sistem pertanian organik melalui pembinaan petani/UKM dan fasilitasi sertifikasi organik.			DINAS PERTANIAN

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buleleng tahun 2021.